

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut konstitusi 2003, kebijakan luar negeri Qatar didasarkan pada prinsip memperkuat perdamaian dan keamanan internasional (Official Website of Qatar Government Communication Office, 2003). Prinsip kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai *open-door policy*. Kehadiran *open-door policy* menjadi suatu dasar yang menunjukkan kemandirian Qatar dalam kebijakan luar negeri. Setelah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1971, politik luar negeri yang dianut oleh Qatar telah mengalami dua tahapan penting, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh Syekh Hamad dan pelepasan kekuasaannya kepada Syekh Tamim pada Juni 2013. Peristiwa pergantian pemimpin kemudian mendorong adanya perubahan *open-door policy*.

Kebijakan luar negeri Qatar pada tahun 1995 yang dipimpin oleh Syekh Hamad lebih memprioritaskan perannya sebagai mediator konflik sesuai dengan *open-door policy* yang dianut pada masa itu (Khatib, 2013: 417-431). Qatar melibatkan diri dalam berbagai upaya negosiasi konflik di Afghanistan, Ethiopia, Irak, Israel, Lebanon, Sudan dan Yaman. Prinsip *open-door policy* di masa ini diartikan sebagai usaha untuk menjalin pertemanan melalui mediasi dan menghindari permusuhan semua pihak sekaligus. Misalnya, di tahun 1996, Qatar mengizinkan Israel membuka kantor perdagangan di ibukota, Doha dan disaat yang bersamaan

juga menerima Hamas bahkan menyediakan tempat tinggal sementara bagi Syekh Yusuf al-Qaradawi—yang merupakan ekstrimis islam pengkritik Israel (Rabi, 2009: 444). Tindakan dari Syekh Hamad telah menjadi sorotan utama dari kebijakan luar negeri Qatar dalam sejumlah konflik yang tidak hanya terbatas di Timur Tengah. Dalam setiap situasi yang dihadapi, Qatar akan secara sigap memberikan bantuan kemanusiaan.

Di tahun 2013, Syekh Hamad digantikan oleh anaknya, yaitu Syekh Tamim. Peristiwa terpilihnya Syekh Tamim menjadi perhatian publik, mengingat usianya yang tergolong sangat muda dan keaktifannya dalam lingkup pemerintahan di Qatar. Dibawah kepemimpinan Syekh Tamim, *open-door policy* mengalami perubahan. Perbedaan *open-door policy* antara Syekh Hamad dan Syekh Tamim terletak dalam penerapannya. Syekh Hamad mengartikannya sebagai sebuah tindakan untuk meningkatkan profil internasional Qatar melalui mediasi konflik, sedangkan Syekh Tamim mengartikannya sebagai sebuah sikap independen progresif. Prinsip *open-door policy* diimplementasikan dengan menekankan pentingnya memperbaiki citra dan mendiversifikasi ekonomi (Kaussler, 2015: 2). Secara progresif, Syekh Tamim mengkritik adanya blokade politik maupun ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara di Teluk sedangkan secara independen, Syekh Tamim memutuskan Qatar untuk keluar dari OPEC sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya energinya sendiri.

Perubahan *open-door policy* memiliki implikasi terhadap adanya upaya memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dari ayahnya, Syekh Hamad.

Kebijakan *open-door policy* pada kepemimpinan Syekh Tamim kemudian memiliki fokus pada pentingnya kedaulatan, pengarustamaan ekonomi dan pemberdayaan pemuda. Misalnya peristiwa krisis diplomatik pada tahun 2017, dimana Qatar harus menerima 13 tuntutan dari negara-negara Arab yang cukup destruktif dengan mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Krisis diplomatik ini muncul akibat adanya kecurigaan pada Qatar atas dukungannya pada Ikhwanul Muslimin, aliansi dengan *Al-Jazeera* dan kedekatannya dengan Iran. Pada akhirnya, pemerintahan Syekh Tamim melihat tekanan diplomatik yang terjadi menjadi peringatan terhadap kedaulatan Qatar yang terancam. Di tahun 2018, Qatar memutuskan untuk keluar dari OPEC (OPEC, 2018). Dalam lingkup produksi minyak di OPEC, Qatar hanya menyumbangkan kurang dari 2% produksi atau sekitar 600.000 barel perhari dibandingkan dengan Arab Saudi yang menyumbangkan 11 juta barel per hari (Baabood, 2017: 5). Kontribusi yang tidak sebanding ini menjadikan Qatar kurang mendapat keuntungan yang besar dibandingkan dengan negara anggota OPEC lainnya. Pada akhirnya, pemerintah Qatar melalui Saad Sherida Al-Kaabi sebagai Menteri Energi memutuskan untuk keluar sebagai suatu strategi pengembangan gas alam cair yang sudah ada sejak lama. Lebih lanjut, kedua peristiwa tersebut merupakan penerapan dari adanya kebijakan *open-door policy*.

Dapat dikatakan bahwa peran aktif Qatar dalam kaitannya dengan kebijakan luar negerinya berbeda antara satu sama lain. Syekh Tamim memiliki pendekatan yang berbeda dengan mencoba tren baru yaitu meninggalkan nilai-nilai konservatisme negara-negara di Arab (Salem, 2012). Pada pemerintahan Syekh

Hamad, Qatar memainkan peran sebagai mediator konflik, namun hasil dari kebijakan tersebut tidak se-progresif masa pemerintahan Syekh Tamim. Sebagai bukti, Tamim menunjukkan dirinya dengan mengambil pemikiran berbeda pada peristiwa krisis diplomatik tahun 2017. Perubahan ini semakin berkembang ketika Tamim memutuskan Qatar untuk keluar dari OPEC dan mengembangkan sumber daya energinya sendiri. Melalui tulisan ini, peneliti akan mencoba menganalisis bagaimana keyakinan, latar belakang dan ide dari Syekh Tamim dalam membingkai *open-door policy* sehingga menyebabkan peristiwa krisis diplomatik tahun 2017 dan keluarnya Qatar di OPEC menggunakan kerangka teori *leader driven change*.

Lebih lanjut, tulisan ini dibuat peneliti dengan menggunakan beberapa sumber bacaan rujukan. Beberapa sumber tersebut, peneliti gunakan agar mendapatkan informasi yang komprehensif. Sebuah buku berjudul "*Geopolitics and Democracy in the Middle East*" yang ditulis oleh Kristina Kausch dijelaskan lebih lanjut bahwa faktor geopolitik Qatar telah mempengaruhi bagaimana perubahan kebijakan luar negeri itu terjadi (Kausch, 2015: 63-76). Menurut bacaan ini, Qatar termasuk dalam kategori "*The Opportunist*" baik dalam aspek kekayaan energi maupun posisinya dengan negara Teluk lainnya. Eksistensinya inilah yang mendorong Qatar mampu menjadi salah satu negara penting yang ada di kawasan. Namun, dinamika yang ada mempengaruhi bagaimana eksistensi Qatar tersebut. Sebuah tulisan berjudul "*Qatari Foreign Policy: The Changing Dynamics of an Outsize Role*" yang ditulis Paul Salem menjelaskan bahwa Qatar telah berpartisipasi aktif dalam kebijakan luar negeri mulai dari pemerintahan Syekh Hamad (Salem, 2012: 1-10). Pada pemerintahan Syekh

Hamad, kebijakan luar negeri Qatar lebih condong untuk mengupayakan proses mediasi konflik. Posisinya sebagai mediator konflik telah membawa imej Qatar yang netral. Namun saat *Arab Spring* terjadi, Doha mulai menggunakan *Al-Jazeera* dan mengalami perubahan kebijakan luar negeri.

Menurut thesis dari Krista Hurttila berjudul "*Regional Balance of Power-Analyzing Cause Behind Qatar's Diplomatic Crisis*" dijelaskan bahwa adanya perubahan kebijakan luar negeri Qatar telah mendorong krisis diplomatik yang terjadi di tahun 2017 (Hurttila, 2019: 26-27). Qatar telah mengubah prinsip mediasi menjadi intervensionis saat krisis itu terjadi. Sedangkan, menurut jurnal berjudul "*The Impact of the GCC Boycott On Qatar Foreign Policy*" yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Shireen Safa, adanya krisis diplomatik yang dilakukan negara-negara Teluk telah mendorong Qatar untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat ekonomi (Wahyuni, 2018: 81). Hal ini karena dampak yang diakibatkan krisis sangat besar dan Qatar seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam bertindak agar eskalasi konflik tidak semakin tinggi.

Dari beberapa bacaan tersebut, penulis menemukan kekosongan penelitian dalam aspek bagaimana dinamika yang ada dengan perubahan kebijakan di Qatar itu merupakan hasil atas perencanaan yang matang dari seorang pemimpin. Beberapa bacaan tersebut juga tidak benar-benar menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan kebijakan luar negeri pada masa kepemimpinan Syekh Tamim melainkan hanya menjelaskan bahwa Qatar mengubah prinsip mediasi hingga menyebabkan krisis diplomatik tahun 2017 padahal pada 2013, Qatar sudah mengalami pergantian

pemimpin. Melalui kekosongan tersebut, peneliti akan mencoba mengisinya dengan membawa faktor pembuat kebijakan khususnya Syekh Tamim sebagai subjek analisis dalam memahami pemikiran serta keyakinannya dalam kebijakan *open-door policy* pada rentang tahun 2017-2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat peneliti yaitu, “*Mengapa Qatar mengubah open-door policy di tahun 2017-2018 pada masa kepemimpinan Syekh Tamim?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana perbedaan latar belakang, ide dan keyakinan Syekh Tamim mempengaruhi perubahan *open-door policy*
2. Mengidentifikasi dampak-dampak perubahan *open-door policy* pada masa kepemimpinan Syekh Tamim Bin Hamad Al-Thani tahun 2017-2018

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap kajian dari Studi Timur Tengah khususnya Qatar di Departemen Hubungan Internasional FISIP UNDIP. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti, bahkan masyarakat pada umumnya mengenai topik tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berupaya untuk menambah pemahaman dan analisis literatur mengenai bagaimana teori perubahan kebijakan luar negeri melihat peristiwa krisis diplomatik dan keluarnya Qatar dari OPEC.

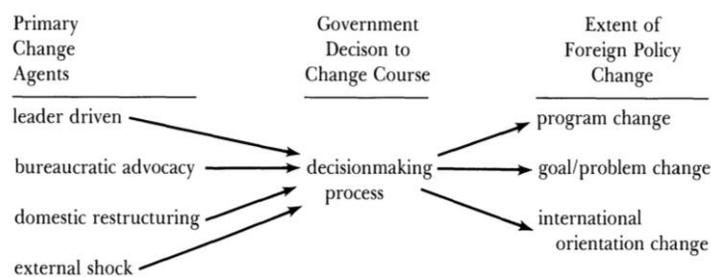
1.5. Kerangka Pemikiran

Hingga saat ini, istilah kebijakan luar negeri telah didefinisikan oleh banyak cendekiawan. Menurut Hermann (1990), kebijakan luar negeri merupakan tindakan berorientasi tujuan yang diambil pemerintah otoritatif terhadap suatu entitas di luar batas negaranya. Lalu, Hill (2003: 22) mengartikan kebijakan luar negeri sebagai jumlah keseluruhan hubungan eksternal negara yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara) dalam hubungan internasional. Selanjutnya, menurut Modelski (1962: 6) kebijakan luar negeri merupakan sebuah sistem atau aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan internasional. Modelski (Dugis, 2008: 102) mengungkapkan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri meliputi beberapa konsep dasar, yaitu; pembuat kebijakan, tujuan, prinsip, daya implementasi, dan yang terakhir adalah konteks atau subjek kebijakan luar negeri tersebut diimplementasikan. Implementasi dari kebijakan luar negeri meliputi banyak instrumen misalnya diplomasi, propaganda bahkan cara-cara ekonomi (Aydin, 2019: 147). Penggunaan instrument tersebut bisa dilakukan secara koersif atau non-koersif. Lebih lanjut, kebijakan luar negeri merupakan suatu hal yang kompleks sehingga ada banyak sekali definisi maupun konsep terkait. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan

luar negeri merupakan segala keputusan dan tindakan negara yang berkaitan dengan lingkungan dan aktor di luar batas negara itu sendiri. Kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan luar negeri dengan menekankan pada faktor pemimpin. Dimana teori ini lahir karena kebijakan luar negeri itu tidak statis dan cenderung mengikuti perubahan dalam mencapai tujuannya. Menurut Rosenau (1974: 47), produk kebijakan luar negeri termasuk perubahannya merupakan hasil dari perubahan atau fenomena yang terjadi dari kondisi internal dan eksternal suatu negara. Dimana negara akan selalu beradaptasi sesuai dengan kondisi internal dan eksternalnya. Pendapat ini sejalan dengan empat model analisis yang dikemukakan oleh Hermann (1990) dalam menjelaskan mengenai sumber perubahan kebijakan luar negeri.

Gambar 1 1

Hubungan antara sumber perubahan dengan tingkat perubahan kebijakan luar negeri



Sumber: (Hermann, 1990: 13)

1. Model analisis faktor *leader driven*. Pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi (biasanya kepala pemerintahan) menjalankan wewenangnya untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Perubahan kebijakan dan arah politik suatu negara biasanya disebabkan oleh perubahan sistem politik akibat

pergantian pemimpin. Sehingga, adanya perbedaan kepercayaan, nilai, gagasan, ide dan karakteristik dengan pemimpin sebelumnya menjadi sebuah alasan wajar mengapa kebijakan luar negeri suatu negara berubah. Hal ini dikarenakan pemimpin itu sendiri memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan masalah internasional dan domestik untuk kemudian merencanakan strategi dan orientasi dari negaranya (Hermann, 1998: 124-137).

2. Model analisis faktor *bureaucratic advocacy*. Birokrasi dalam konteks ini menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan. Dimana birokrasi memegang perannya dalam akses dengan pemimpin tertinggi dalam hal pengaruh politik, administratif dan struktur pemerintahan. Adanya birokrasi akan mampu membantu pemimpin tertinggi ketika dihadapkan pada suatu keputusan karena terdiri dari orang-orang yang ahli sesuai dengan jabatan yang diberikan. Sehingga birokrasi sebagai salah satu pembuat kebijakan juga dapat menjadi faktor berubahnya kebijakan luar negeri.
3. Model analisis faktor *domestic restructuring*. Model ini menekankan pada masyarakat sebagai suatu elemen penting dalam proses perubahan kebijakan luar negeri. Kehadiran masyarakat bisa menjadi pendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri melalui dukungannya terhadap program pemerintah ataupun bersikap secara kontra. Dimana nantinya pembuat kebijakan akan berusaha melakukan restrukturisasi kebijakan untuk menyesuaikan keinginan masyarakat. Dan jika masyarakat puas dengan hasil

tersebut, maka tujuan dari apa yang ingin dicapai pemerintah juga akan semakin berjalan dengan baik. Sehingga, masyarakat juga bisa dikatakan sebagai agen perubahan.

4. Model analisis faktor *external shocks*. Adanya fenomena dramatis yang terjadi di dunia internasional dapat membuat sebuah negara menyesuaikan dirinya dengan cara mengubah kebijakan luar negeri negara tersebut. Fenomena yang ada biasanya akan berkaitan secara langsung atau tidak langsung, sehingga mendorong pemerintah suatu negara untuk bertindak dalam mengambil suatu kebijakan.

Lebih lanjut, aktivitas perubahan kebijakan luar negeri tidak hanya dilakukan oleh negara-negara besar saja. Kehadiran negara-negara kecil sangat penting karena dapat mewarnai dinamika hubungan internasional, misalnya Qatar. Karena keunikannya, negara-negara kecil cenderung memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mencapai hasil kebijakan luar negeri yang menguntungkan. Namun, negara-negara kecil juga akan jauh diuntungkan ketika dihadapkan pada kepentingan masyarakat (Alesina & Spolaore, 2003: 187)

Sebagai salah satu negara Teluk, Qatar memilih untuk melakukan perubahan terhadap salah satu prinsip yang ada sejak lama yaitu *open-door policy*. Perubahan kebijakan luar negeri yang ada ini merupakan hasil dorongan pemikiran seorang Emir bernama Syekh Tamim. Pada kepemimpinan sebelumnya yang dipegang oleh ayahnya, bernama Syekh

Hamad, prinsip *open-door policy* menekankan pada peran sebagai mediator konflik. Strategi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan semua pihak yang berkonflik. Berbeda dengan ayahnya, Syekh Tamim mendefinisikan *open-door policy* sebagai sebuah tindakan independen progresif. Strategi yang dilakukan adalah dengan bersikap netral pada krisis diplomatik tahun 2017 dan memilih sikap independen pada pemberdayaan energi dalam peristiwa keluarnya dari OPEC.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Tulisan ini akan memuat beberapa konsep sebagai berikut:

a. Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Studi mengenai perubahan kebijakan luar negeri pada awalnya kurang menjadi perhatian bagi banyak orang. Hal ini lalu disampaikan oleh Holsti melalui tulisannya dengan menjelaskan bahwa studi perubahan kebijakan luar negeri butuh lebih banyak penelitian karena merupakan bagian dari kajian kebijakan luar negeri yang menjelaskan teknik, pendekatan integratif, perspektif teoretis, tingkat analisis dan eksplanasi mengenai bagaimana suatu kebijakan yang diadopsi negara bisa berbeda (Holsti, Monterichard, & Ibrahim, 1982: 9). Dalam hal ini, kondisi perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan politik internasional yang disalurkan oleh struktur pemerintahan dimana di dalamnya ada otoritas yang mampu mengerahkan sumber daya masyarakat (Hermann & Hermann, 1989: 362). Menurut James N. Rosenau

(1974: 47), produk kebijakan luar negeri termasuk perubahannya merupakan hasil dari perubahan atau fenomena yang terjadi dari kondisi internal dan eksternal suatu negara. Negara akan selalu beradaptasi sesuai dengan kondisi internal dan eksternalnya.

Secara umum perubahan kebijakan luar negeri didorong oleh perubahan dari pergantian rezim/transformasi negara dan perubahan yang dilakukan pemerintah berkuasa untuk mengubah arah kebijakannya (Hermann, 1990: 7). Perubahan kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan perubahan sistem politik pemimpin terdahulu biasa disebut sebagai *foreign policy redirecting*. Sedangkan, disaat pemerintah yang ada mengubah arah dalam kebijakan luar negeri dan bersifat untuk memperbaiki, maka disebut juga sebagai *self-correcting*. Menurut Hermann (1990) ada beberapa tahapan dari perubahan kebijakan luar negeri yang meliputi;

1. Tahapan *initial policy expectations*. Pada tahapan ini pemimpin diharapkan memiliki ekspektasi mengenai kebijakan yang akan dibentuk. Pengambil kebijakan akan berusaha meminimalisir kemungkinan adanya dampak negatif yang dihasilkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.
2. Tahapan *external actor/environmental stimuli*. Perubahan akibat adanya peristiwa diluar negara yang mempengaruhi kebijakan yang akan dibentuk.

3. Tahapan *recognition of discrepant information*. Adanya rangsangan eksternal ini mendorong pembuat kebijakan untuk bertindak dalam menemukan informasi yang ada.
4. Tahapan *postulation of a connection between problem and a policy*. Pada tahapan ini, pembuat kebijakan harus bisa mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan yang sudah ada dengan masalah yang masih berkembang. Pembuat kebijakan harus bisa membuktikan tidak efektifnya kebijakan yang ada untuk nantinya bisa diperbarui.
5. Tahapan *development of alternative*. Pada tahapan ini, pembuat kebijakan tidak menemukan cara untuk mengurangi masalah yang dihadapi, sehingga membuat kebijakan baru akan dilakukan. Lebih lanjut, pembuat kebijakan melakukan ini karena didorong dua hal yaitu, perubahan kebijakan dan perubahan penafsiran masalah.
6. Tahapan *building authoritative consensus for choice*. Pada dasarnya tahapan ini mengimplikasikan bahwa terbentuknya suatu kebijakan merupakan consensus dari beberapa pihak. Hal ini bertujuan agar ketika kebijakan tersebut diimplementasikan banyak pihak merasa diakomodir kepentingannya.
7. Tahapan *implementation of new policy*. Pada tahapan ini dijelaskan bahwa kebijakan baru yang ada sudah diterapkan. Pembuat kebijakan baik itu individual atau secara kelembagaan menjalankan komitmennya untuk menerapkan kebijakan baru yang sudah dibuat.

b. *Leader Driven Change*

Pada awalnya, perubahan kebijakan luar negeri lebih banyak berfokus pada analisis perubahan kekuatan keseimbangan maupun politik domestik. Namun, dewasa ini, analisa kebijakan luar negeri juga mulai memasukkan unsur politik internasional dan perilaku individu ataupun kolektif dalam menghasilkan produk kebijakan luar negeri. Pada akhirnya, beberapa ahli mulai memasukkan faktor individu pembuat keputusan sebagai salah satu faktor independennya (Jian, 1996: 25).

Seperti yang diketahui, pemimpin adalah seseorang yang memiliki wewenang dalam menentukan suatu kebijakan. Pemimpin disebut juga sebagai agen perubahan yang bisa mempengaruhi orang lain dengan cara memodifikasi motivasi atau kompetensi dalam suatu kelompok (Preston, 2017: 2). Kepemimpinan didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih anggota dalam kelompok yang melibatkan adanya strukturisasi dan restrukturisasi dari situasi, persepsi maupun ekspektasi anggota (Bass & Stogdill, 1990: 88). Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Konteks kebijakan luar negeri mulai dikaitkan dengan beberapa hal penting seperti karakteristik individual (pemimpin) serta karakteristik nasional dan sosial (Hudson & Vore, 1995: 210). Selain itu, dalam melihat perubahan kebijakan luar negeri penting untuk melihat bagaimana sifat sistem politik dan hubungannya

dengan konstitusi. Lebih lanjut, konsep mengenai kepemimpinan ini dinilai penting mengingat Qatar merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan monarki. Emir di Qatar merupakan seorang kepala negara sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam segala pengambilan keputusan. Pemilihan Emir juga terbatas karena hanya dipilih berdasarkan keturunan sebelumnya.

Konsep ini pada dasarnya melihat visi dan keyakinan dari pembuat kebijakan ketika perubahan kebijakan luar negeri itu dibentuk hingga diimplementasikan (Hermann C. F., 1990). Proses perubahan kebijakan dapat dimulai dengan individu, yang memiliki keinginan untuk mengubah kebijakan dengan karakteristik nilai-nilai atau ide yang dianut pribadi tersebut. Proses perubahan ini bisa dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada sebelumnya atau melakukan perubahan yang cukup besar dengan melihat kondisi lingkungan internasional atau nasional. Namun, perubahan dalam lingkungan eksternal maupun internal tidak sepenuhnya menjadi faktor utama dalam mengubah suatu kebijakan, melainkan menjadi sebuah kesempatan bagi pemimpin tersebut (Doeser, 2013, p. 584).

1.7. Argumen Penelitian

Argumen utama dalam penelitian ini adalah adanya keyakinan dan pemikiran sehingga menyebabkan prinsip *open-door policy* berubah pada kepemimpinan Syekh Tamim, yang awalnya berfokus sebagai mediator konflik menjadi gerakan independen progresif. Dalam hal ini, Syekh Tamim sebagai agen perubahan utama

open-door policy memiliki latar belakang yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Di kepemimpinannya, prinsip *open-door policy* memiliki fokus pada pengarusutamaan ekonomi, pentingnya kedaulatan dan pemberdayaan pemuda. Perubahan *open-door policy* kemudian mendorong adanya peristiwa krisis diplomatik tahun 2017 hingga keluarnya dari OPEC tahun 2018 yang menunjukkan kemandirian dan kemajuan pemikiran dalam kebijakan luar negeri di Qatar.

1.8. Metode Penelitian

Guna membuat penelitian ini menjadi terstruktur dan terarah, maka tulisan ini memiliki metode penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi (Sarwono, 2006:193). Penelitian mencoba untuk menjelaskan fenomena dan mengidentifikasi hasil dari fenomena yang diteliti mengenai perubahan *open-door policy* yang dilakukan Syekh Tamim pada tahun 2017-2018. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari sebab dan akibat dari suatu fenomena tertentu (Hancock, 2009: 9)

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Syekh Tamim Bin Hamad Al-Thani sebagai Emir di Qatar sejak tahun 2013 dan yang memegang peranan penting dalam perubahan kebijakan luar negerinya.

1.8.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya untuk tujuan peneliti tersebut (Hox & Boejie, 2005: 596). Data sekunder bisa didapatkan melalui pidato, *press release*, pernyataan, maupun wawancara media yang membahas mengenai perubahan kebijakan luar negeri Qatar pada tahun 2017-2018.

1.8.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan didapat dari beberapa situs resmi pemerintah seperti Amiri Diwan, Kementerian Energi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi. Selain situs resmi pemerintah, penulis juga akan menggunakan sumber yang berasal dari Youtube, CNN, BBC, *Al-Jazeera*, dan lain-lain. Selain itu, untuk studi literatur dilakukan dengan mengkaji penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri sebelum terjadinya perubahan, kepemimpinan Syekh Tamim Bin Hamad Al-Thani dalam

berbagai urusan internasional khususnya ketika krisis diplomatik tahun 2017 hingga keluar dari OPEC tahun 2018 serta penelitian lainnya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah *desk research* atau studi pustaka dengan membaca beberapa literatur dan studi arsip, Dimana studi pustaka diartikan sebagai teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak perlu turun ke lapangan secara langsung (Hague, 2006: 59). Dalam mengumpulkan data, peneliti akan meneliti literatur atau penelitian sebelumnya terkait dengan perubahan kebijakan luar negeri di masa Syekh Tamim Hamad Bin Al Thani. Selain itu, peneliti akan meneliti arsip, dan juga publikasi-publikasi di internet. Dalam melakukan penelitian, penulis akan mengumpulkan data yang mendukung argumen penelitian.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan digunakan peneliti adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan teknik penelitian dengan melakukan analisis terhadap konten aktual yang dapat berupa bentuk bentuk komunikasi seperti buku, surat kabar, jenis komunikasi yang dapat dianalisis (Frankel and Wallen, 2007: 483). *Content analysis* digunakan dalam menentukan adanya suatu kata kata, konsep, atau kalimat dalam suatu teks. Penggunaan teks tersebut dapat didefinisikan dalam bentuk esai, buku, wawancara, artikel, pidato, dan sebagainya. Dalam hal ini,

penulis akan mengumpulkan data dari sumber sumber berupa wawancara media, berita, dan video pernyataan Syekh Tamim yang lalu dianalisis maksudnya. Pada penelitian ini, *content analysis* akan digunakan untuk menganalisis pernyataan dan pemikiran dari Syekh Tamim terkait pembentukan hingga penerapan dari *open-door policy*.

1.8.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan memuat empat bab seperti berikut;

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang dari perubahan kebijakan luar negeri *open door policy* yang terjadi di Qatar pada masa kepemimpinan Syekh Hamad hingga Syekh Tamim secara umum, rumusan masalah penelitian tentang bagaimana dampak perubahan kebijakan luar negeri tersebut dan kerangka teori kebijakan luar negeri.

b. Bab II Gambaran Umum

Pada bab ini peneliti akan memberikan deskripsi dan dinamika politik internasional Qatar, terutama penjelasan mengenai krisis Qatar. Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai dinamika perubahan politik luar negeri Qatar dimulai dari saat merdeka hingga kepemimpinan Syekh Tamim.

c. Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penemuan penelitian menggunakan metode *content analysis* yang didasarkan pada studi literatur maupun data sekunder dalam menjelaskan bagaimana dampak perubahan *open-door policy* Qatar terhadap peristiwa krisis diplomatik tahun 2017 dan keluarnya dari OPEC menggunakan konsep *leader driven change* dari Hermann.

d. Bab IV Kesimpulan

Pada bagian terakhir dalam penelitian ini peneliti akan membuat penarikan kesimpulan serta saran bagi penelitian selanjutnya guna melengkapi penelitian ini